

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achdian, Andi, 2009, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah : Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Kekal Press, Bogor.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burger, 1960, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I*, Pradnja Paramita, Djakarta.
- Dirman, 1952, *Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia*, J.B Wolters, Jakarta.
- Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), 2007, *Hak Asasi Petani*, Petani Pers, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2005, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta
- Kartodirdjo, Sartono, Djoko Suryo, 1991, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, 2005, Prenada Media, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Perundang-undangan Agraria di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Jakarta.
- Mubyarto, *et al.*, 1992, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Muhjad, M. Hadin, Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Parlindungan, A.P, 1978, *Berbagai Aspek Pelaksanaan U.U.P.A.*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1992, *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan UUPA*, Mandar Maju, Bandung.

Pelzer, Karl, 1991, *Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Bayu Media, Jawa Timur.*

Siagian, Renville, 2013, *182 Tahun Perkebunan di Indonesia (1830-2012)*, Yayasan Cempaka Kencana, Yogyakarta.

Tauchid, Mochamad, 1953, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia bagian II*, Tjakrawala, Jakarta.

Teguh, *et al.*, 2013, *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, Nusa Media, Bandung.

## **B. Artikel Jurnal**

Pasaribu, Sahat M., Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi Di Indonesia : Alternatif Skenario Melindungi Petani dan Usaha Tani, Penelitian Badan Litbang Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Rachmat, Muchjidin, “Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani”, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 31 No. 2, Desember 2013.

Syahyuti, “Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian”, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 31 No. 1, Juli 2013.

## **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Faizah, Lilis Nur, 2007, *Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengambilalihan Hak Atas Tanah di Indonesia (1961-2006)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Ramadhana, Billy Nugraha, 2012, *Perkembangan Sistem Kepemilikan Tanah Pada Perkebunan Tebu di Sindanglaut, Cirebon (1870-1968)*, Skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung.

#### **D. Artikel Internet**

Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22>, diakses tanggal 10 April 2016.

Dharminto, “*Metode Penelitian dan Penelitian Sampel*”, [http://eprints.undip.ac.id/5613/1/METODE PENELITIAN - dharminto.pdf](http://eprints.undip.ac.id/5613/1/METODE_PENELITIAN_-_dharminto.pdf), diakses 16 Februari 2016.

KBBI, [kbbi.co.id/arti-kata/kriminalisasi](http://kbbi.co.id/arti-kata/kriminalisasi), diakses tanggal 10 April 2016.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Rakyat Perkebunan, “UU Perkebunan Kembali Hidupkan Represi Negara Terhadap Perjuangan Petani”, [www.kpa.or.id/news/blog/uu-perkebunan-kembali-hidupkan-represi-negara-terhadap-perjuangan-petani/](http://www.kpa.or.id/news/blog/uu-perkebunan-kembali-hidupkan-represi-negara-terhadap-perjuangan-petani/), diakses 10 April 2016.

Muhammad Zainul Asror, Balai Tani : Alternatif Jaminan Sosial untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani, [www.lpdnotb.com/2016/03/balai-tani-alternatif-jaminan-sosial.html?m=1](http://www.lpdnotb.com/2016/03/balai-tani-alternatif-jaminan-sosial.html?m=1), diakses 10 April 2016.

Rangga Afianto, Rangkaian Permasalahan Pendaftaran Tanah Pertanian, [rangforjustice.blogspot.com/2011/08/rangkaian-permasalahan-pendaftaran.html?m=1](http://rangforjustice.blogspot.com/2011/08/rangkaian-permasalahan-pendaftaran.html?m=1), diakses tanggal 26 Juni 2016.

Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, “*Press Release Tim Advokasi Keadilan Untuk Perkebunan, Titik Api dan Asap Dalam UU Perkebunan No 39 Tahun 2014 Di Gugat ke Mahkamah Konstitusi*”, [en.ihcs.or.id/?p=665](http://en.ihcs.or.id/?p=665), diakses 18 Juni 2016

Zoebir, Zuuryawan Isvandiar, “*Bayang-Bayang Cultuurstelsel dan Domein Verklaring Dalam Praktik Politik Agraria*”. <http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/2008/11/07/bayang-bayang-cultuurstelsel-dan-domein-verklaring-dalam-praktik-politik-agraria/>, diakses 25 Februari 2016.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan Dalam *Vorstenlands Grondhuurreglement*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "*Grondhuurordonantie*" (Stbl 1918 No. 88) Dan "*Vorstenlandsch Grondhuurreglement*" (Stbl. 1918 No. 20)" Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957 Tentang Perubahan *Canon* dan *Cjins* atas hak-hak *erfpacht* dan konsesi guna perusahaan kebun besar

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No.38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu.

Inpres Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Lembaran Negara S. tahun 1834 No. 22, Sistem Tanam Paksa

*Regeerings Reglement* 1854 S. 1856-64

*Koninklijk Besluit* 7 November 1856

*Agrarische Wet* S 1870-55

*Grondhuur Ordonnantie* (S. 1918 no.88)

*Vorstenlands Grondhuur Reglement* (S. 1918 no. 20)

*Agarische Besluit* S. 1870 No. 118

Ordonnantie 1937 S. 1937 no. 560 tentang “*Nadere regeling van de rechtsvordering tot ontruiming van onrechmatig door indonesiers in gebruik genomen erfpachts percelen*”

Undang-Undang Balatentara Dai Nippon No. 17 tanggal 1 Juni 2602

Ordonnantie 1948 S. 1948 no. 110 tentang “*Ordonnantie onrechtmatige occupatie van gronden*”

#### **F. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-VIII/2010